KEBIJAKAN DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH DASAR (SD)

Ismail[1], Kasful Anwar Us[2]

[1,2]*Institut Islam Ma'arif Jambi*
E-mail : ismail098@guru.sd.belajar.id[1], kasfulanwarus@uinjambi.ac.id[2]

ABSTRAK

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar (SD) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, akhlak mulia, dan kepribadian peserta didik sejak usia dini. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan Islam di SD sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, implementasi kurikulum, kompetensi guru, serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam perkembangannya, berbagai kebijakan pendidikan nasional, seperti implementasi Kurikulum Merdeka, memberikan peluang bagi sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan berorientasi pada penguatan karakter. Namun, pelaksanaan pendidikan Islam di SD masih menghadapi berbagai problematika, antara lain keterbatasan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif, terbatasnya sarana dan prasarana, rendahnya integrasi teknologi digital dalam pembelajaran, kurangnya alokasi waktu Pendidikan Agama Islam, serta belum optimalnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pembinaan karakter peserta didik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan problematika pendidikan Islam di Sekolah Dasar serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode **studi kepustakaan (library research)** dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis berbagai sumber berupa buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di SD telah memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter religius dan kompetensi peserta didik. Namun, implementasinya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana pembelajaran yang memadai, pemanfaatan teknologi digital secara bijaksana, serta penguatan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan Islam di Sekolah Dasar diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, memiliki kemampuan berpikir kritis, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam.

Kata Kunci : *Kebijakan Pendidikan Islam, Problematika Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam, Sekolah Dasar, Kurikulum Merdeka.*

ABSTRACT

Islamic Religious Education (PAI) in elementary schools plays a strategic role in shaping the character, noble morals, and personality of students from an early age. The success of Islamic education in elementary schools is greatly influenced by government policies, curriculum implementation, teacher competence, and support from the family and community. Over time, various national education policies, such as the implementation of the Independent Curriculum (Kurikulum Merdeka), provide opportunities for schools to develop more flexible, student-centered, and character-building learning. However, the implementation of Islamic education in elementary schools still faces various challenges, including limited teacher competence in implementing innovative learning, limited facilities and infrastructure, low integration of digital technology into learning, insufficient time allocated for Islamic Religious Education, and suboptimal synergy between schools, families, and the community in fostering student character. This article aims to analyze the policies and challenges of Islamic education in elementary schools and identify possible efforts to improve the quality of its implementation. The study employed a library research method with a qualitative descriptive approach, analyzing various sources including books, scientific journal articles, laws and regulations, and official documents related to Islamic education policy in Indonesia. The study's findings indicate that Islamic education policy in elementary schools has provided a strong foundation for developing learning oriented toward the formation of religious character and student competency. However, its implementation still requires strengthening through improving teacher competency, providing adequate learning resources, wisely utilizing digital technology, and strengthening collaboration between schools, parents, and the community. Therefore, Islamic education in elementary schools is expected to produce students who are faithful, pious, have noble morals, possess critical thinking skills, and are able to face the challenges of scientific and technological developments without abandoning Islamic values.

Keywords : *Islamic education policy, problems in Islamic education, Islamic Religious Education, Elementary Schools, Independent Curriculum.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa karena berperan dalam mengembangkan potensi manusia secara utuh, baik dari aspek intelektual, spiritual, emosional, maupun sosial. Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki fungsi yang sangat strategis dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Allah Swt., serta memiliki akhlak mulia. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), pendidikan Islam menjadi fondasi awal bagi pembentukan karakter dan moral peserta didik karena pada usia tersebut anak berada pada fase perkembangan yang sangat menentukan pembentukan kepribadian dan kebiasaan hidupnya (Majid & Andayani, 2019).

Pendidikan Islam di Sekolah Dasar tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keimanan, ibadah, akhlak, serta sikap sosial yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus mampu mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga peserta didik tidak hanya memahami konsep-konsep keagamaan, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan nyata (Muhaimin, 2020).

Penyelenggaraan pendidikan Islam di Sekolah Dasar di Indonesia didasarkan pada berbagai kebijakan pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta berbagai kebijakan implementasi Kurikulum Merdeka. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran wajib yang diberikan pada setiap jenjang pendidikan dan diarahkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki kompetensi akademik sekaligus karakter yang religius (Republik Indonesia, 2003; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

Implementasi Kurikulum Merdeka membawa perubahan dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. Guru diberikan keleluasaan untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, memanfaatkan teknologi digital, serta mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam setiap kegiatan pembelajaran. Selain itu, penguatan karakter religius juga diwujudkan melalui berbagai pembiasaan, seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar, membaca Al-Qur'an, salat berjamaah, infak, serta kegiatan sosial yang menanamkan nilai kepedulian dan tanggung jawab (Kemendikbudristek, 2022).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Dasar masih menghadapi berbagai problematika. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan adalah keterbatasan kompetensi guru dalam menerapkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka. Di samping itu, masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, minimnya pemanfaatan media dan teknologi digital, keterbatasan alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, serta perbedaan latar belakang peserta didik yang memengaruhi keberhasilan pembelajaran (Sanjaya, 2021).

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membentuk karakter religius peserta didik. Pendidikan karakter tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada sekolah karena lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam membiasakan nilai-nilai keagamaan. Di era digital, peserta didik juga menghadapi berbagai pengaruh negatif dari media sosial, budaya global, dan perkembangan teknologi yang

dapat memengaruhi perilaku, moral, serta pemahaman keagamaan apabila tidak diimbangi dengan pendidikan Islam yang kuat (Nata, 2021).

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga memperkuat kompetensi guru, menyediakan sarana pembelajaran yang memadai, meningkatkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, serta mengembangkan pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Sekolah Dasar sehingga tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan Islam di Sekolah Dasar, menganalisis berbagai problematika yang dihadapi dalam implementasinya, serta mengidentifikasi berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena atau permasalahan penelitian (Zed, 2018). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mendeskripsikan secara sistematis berbagai kebijakan serta problematika pendidikan Islam di Sekolah Dasar berdasarkan teori, hasil penelitian terdahulu, dan regulasi yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai implementasi Kurikulum Merdeka, serta Keputusan Menteri Agama tentang implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, prosiding, serta dokumen ilmiah lainnya yang membahas kebijakan pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar, pengembangan kurikulum, dan berbagai permasalahan dalam implementasinya (Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, mengelompokkan, dan mencatat informasi penting dari berbagai sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, yaitu kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Dasar, implementasi kebijakan, problematika yang dihadapi, serta alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan untuk menelaah isi berbagai dokumen dan literatur secara kritis sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan dan problematika pendidikan Islam di Sekolah Dasar. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data,

interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data yang telah dikumpulkan diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara kebijakan pendidikan Islam dengan berbagai tantangan implementasinya di lapangan. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai kebijakan, problematika, dan upaya penguatan pendidikan Islam di Sekolah Dasar (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

Melalui metode studi kepustakaan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Dasar, berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, serta rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah Dasar (SD)

Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan Islam di Sekolah Dasar memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran wajib yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan agama yang dianutnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Agama Islam bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (Republik Indonesia, 2003).

Seiring perkembangan kebijakan pendidikan nasional, pemerintah menerapkan Kurikulum Merdeka sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam implementasinya di Sekolah Dasar, Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, serta mengintegrasikan penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, guru diberikan kesempatan mengembangkan materi yang kontekstual dengan kehidupan peserta didik tanpa mengabaikan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah (Kemendikbudristek, 2022).

Selain kebijakan kurikulum, pemerintah juga mengembangkan berbagai program penguatan karakter, seperti pembiasaan membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran, salat berjamaah, literasi Al-Qur'an, kegiatan infak, serta pembentukan budaya sekolah yang religius. Kebijakan tersebut bertujuan membangun keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan pembentukan akhlak mulia (Majid & Andayani, 2019).

Kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Dasar (SD) merupakan serangkaian peraturan, program, dan strategi yang disusun oleh pemerintah untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan Agama Islam (PAI) secara efektif dalam rangka membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi sekolah, kepala sekolah, guru, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara terarah dan berkelanjutan.

Dasar hukum utama penyelenggaraan pendidikan Islam di Sekolah Dasar adalah **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**. Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (Republik Indonesia, 2003). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional.

Selain Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar juga mengacu pada **Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan** yang mengatur standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, serta standar pengelolaan pendidikan. Melalui regulasi tersebut, pemerintah berupaya menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam agar sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Kebijakan terbaru dalam bidang pendidikan adalah penerapan **Kurikulum Merdeka**. Dalam kebijakan ini, guru memperoleh fleksibilitas untuk menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, dan kebutuhan lingkungan belajar. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam tidak lagi berorientasi pada penyampaian materi semata, tetapi diarahkan pada pembelajaran yang aktif, kontekstual, bermakna, serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan karakter peserta didik (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

Pada Kurikulum Merdeka, Pendidikan Agama Islam juga berperan dalam mendukung pembentukan **Profil Pelajar Pancasila**. Nilai-nilai keislaman diintegrasikan dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila, seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Dengan demikian, pembelajaran Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari (Kemendikbudristek, 2022).

Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan pembelajaran maupun pembiasaan di sekolah. Pada kegiatan intrakurikuler, guru mengajarkan materi Al-Qur'an, akidah, akhlak, ibadah, dan sejarah Islam dengan menggunakan pendekatan yang aktif dan berpusat pada peserta didik. Pada kegiatan kokurikuler, sekolah mengembangkan proyek penguatan karakter, seperti kegiatan peduli lingkungan, berbagi kepada sesama, dan proyek sosial yang dikaitkan dengan ajaran Islam. Sementara itu, pada kegiatan ekstrakurikuler, sekolah menyelenggarakan tahfiz Al-Qur'an, tilawah, kaligrafi, Rohani Islam (Rohis), pesantren kilat, dan peringatan hari besar Islam sebagai sarana penguatan karakter religius peserta didik (Muhaimin, 2020).

Selain kebijakan kurikulum, pemerintah juga mendorong penguatan budaya sekolah religius melalui berbagai program pembiasaan. Kegiatan seperti membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran, salat Duha, salat Zuhur berjamaah, tadarus Al-Qur'an, infak Jumat, peringatan hari besar Islam, dan kegiatan sosial menjadi bagian penting dalam membentuk karakter peserta didik. Pembiasaan tersebut diyakini mampu menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kepedulian, dan sikap toleransi yang sesuai dengan ajaran Islam (Majid & Andayani, 2019).

Dalam pelaksanaannya, kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Dasar juga menuntut peningkatan kompetensi guru. Guru Pendidikan Agama Islam diharapkan tidak hanya menguasai materi keislaman, tetapi juga memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian

yang baik. Guru harus mampu memanfaatkan teknologi digital, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menyusun asesmen autentik, serta menjadi teladan dalam sikap dan perilaku bagi peserta didik (Sanjaya, 2021).

Berdasarkan hasil kajian, kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Dasar telah memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam. Berbagai regulasi yang diterbitkan pemerintah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan kurikulum, peningkatan kualitas guru, pembentukan karakter religius, serta penyesuaian pembelajaran dengan perkembangan zaman. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan sekolah, kompetensi guru, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat agar tujuan pendidikan Islam dapat diwujudkan secara optimal dan berkelanjutan.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah Dasar

Berdasarkan hasil kajian, implementasi kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Dasar dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pada kegiatan intrakurikuler, guru mengajarkan materi Pendidikan Agama Islam yang meliputi Al-Qur'an Hadis, akidah, ibadah, akhlak, dan sejarah Islam dengan menggunakan pendekatan yang aktif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik.

Dalam kegiatan kokurikuler, sekolah mengembangkan proyek penguatan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, seperti proyek kepedulian terhadap lingkungan, kegiatan berbagi kepada sesama, serta pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning*). Melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (Muhaimin, 2020).

Adapun kegiatan ekstrakurikuler meliputi tahfiz Al-Qur'an, tilawah, kaligrafi, Rohani Islam (Rohis), peringatan hari besar Islam, pesantren kilat, dan bakti sosial. Berbagai kegiatan tersebut berfungsi memperkuat karakter religius, kepemimpinan, tanggung jawab, serta kepedulian sosial peserta didik.

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Dasar (SD) merupakan proses penerapan berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah ke dalam kegiatan pembelajaran, pembinaan karakter, serta budaya sekolah yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Implementasi ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sekaligus membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki kemampuan menghadapi perkembangan zaman. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang berlaku, tetapi juga oleh kesiapan sekolah, kompetensi guru, dukungan orang tua, serta partisipasi masyarakat (Muhaimin, 2020).

Salah satu bentuk implementasi kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Dasar adalah penerapan **Kurikulum Merdeka** pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi lingkungan sekolah, serta kebutuhan belajar. Guru didorong untuk menggunakan berbagai model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga peserta didik tidak hanya memahami materi agama secara teoritis, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

Dalam proses pembelajaran, guru Pendidikan Agama Islam mengintegrasikan materi akidah, ibadah, akhlak, Al-Qur'an, hadis, dan sejarah kebudayaan Islam dengan pengalaman nyata

peserta didik. Misalnya, ketika mempelajari materi tentang kebersihan, guru tidak hanya menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga mengajak peserta didik mempraktikkan perilaku hidup bersih melalui kegiatan membersihkan kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan membiasakan mencuci tangan sebelum makan. Pendekatan kontekstual tersebut membantu peserta didik memahami bahwa ajaran Islam memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan sehari-hari (Nata, 2021).

Implementasi kebijakan pendidikan Islam juga diwujudkan melalui **pembiasaan nilai-nilai religius** dalam budaya sekolah. Pembiasaan ini dilakukan secara rutin melalui kegiatan membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran, mengucapkan salam ketika memasuki kelas, membaca Al-Qur'an atau tadarus pada waktu tertentu, melaksanakan salat Duha dan salat Zuhur berjamaah, memperingati hari-hari besar Islam, serta melaksanakan kegiatan infak dan sedekah. Kegiatan tersebut bertujuan menanamkan karakter religius, disiplin, tanggung jawab, kepedulian sosial, serta kecintaan peserta didik terhadap ajaran Islam sejak usia dini (Majid & Andayani, 2019).

Selain kegiatan intrakurikuler, implementasi kebijakan juga dilakukan melalui **kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler**. Pada kegiatan kokurikuler, guru dapat mengembangkan proyek penguatan karakter, seperti proyek menjaga kebersihan masjid, bakti sosial, gerakan peduli lingkungan, atau kegiatan berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, kegiatan ekstrakurikuler meliputi tahfiz Al-Qur'an, tilawah, kaligrafi, Rohani Islam (Rohis), lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), pesantren kilat, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya yang mendukung pengembangan potensi peserta didik di bidang keislaman.

Dalam era digital, implementasi kebijakan pendidikan Islam juga ditandai dengan pemanfaatan **teknologi informasi dan komunikasi** sebagai media pembelajaran. Guru menggunakan video pembelajaran Islami, aplikasi pembelajaran Al-Qur'an, media presentasi interaktif, serta berbagai platform pembelajaran digital untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Pemanfaatan teknologi tersebut harus disertai dengan penanaman etika digital agar peserta didik mampu menggunakan teknologi secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Sanjaya, 2021).

Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Dasar juga sangat dipengaruhi oleh **peran guru**. Guru Pendidikan Agama Islam tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi pendidik, pembimbing, motivator, fasilitator, sekaligus teladan bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru dituntut memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang baik agar mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan serta menjadi contoh dalam pengamalan ajaran Islam (Muhaimin, 2020).

Selain guru, **peran orang tua dan masyarakat** juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam. Sekolah perlu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua melalui program parenting, pertemuan rutin, dan kegiatan keagamaan bersama agar pembiasaan nilai-nilai Islam dapat berlangsung secara berkesinambungan di rumah maupun di sekolah. Dukungan masyarakat, tokoh agama, dan lembaga keagamaan juga diperlukan untuk memperkuat pendidikan karakter peserta didik melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

Berdasarkan hasil kajian, implementasi kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Dasar telah menunjukkan perkembangan yang positif, terutama melalui penerapan Kurikulum Merdeka, penguatan budaya sekolah religius, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta peningkatan kualitas proses pembelajaran. Namun, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai

tantangan, seperti keterbatasan kompetensi guru, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta belum optimalnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan pendidikan Islam dapat diterapkan secara efektif sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan siap menghadapi tantangan kehidupan di masa depan.

Problematika Pendidikan Islam di Sekolah Dasar

Hasil penelitian kepustakaan menunjukkan bahwa implementasi pendidikan Islam di Sekolah Dasar masih menghadapi berbagai permasalahan.

1. Kompetensi Guru yang Belum Merata

Masih terdapat guru Pendidikan Agama Islam yang mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran inovatif sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka. Sebagian guru masih menggunakan metode ceramah secara dominan sehingga pembelajaran belum sepenuhnya berpusat pada peserta didik. Selain itu, kemampuan guru dalam menyusun modul ajar, asesmen autentik, dan pembelajaran berdiferensiasi juga masih perlu ditingkatkan (Sanjaya, 2021).

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sebagian sekolah, khususnya di daerah terpencil, masih mengalami keterbatasan media pembelajaran, perpustakaan, ruang ibadah yang memadai, perangkat teknologi, dan akses internet. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam belum dapat memanfaatkan media digital secara optimal.

3. Terbatasnya Alokasi Waktu Pembelajaran

Alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar dinilai masih terbatas jika dibandingkan dengan luasnya materi yang harus dipelajari. Akibatnya, guru lebih banyak menekankan penyampaian materi dibandingkan pembiasaan praktik keagamaan dan pembentukan karakter peserta didik (Majid & Andayani, 2019).

4. Pengaruh Perkembangan Teknologi dan Media Digital

Perkembangan teknologi informasi memberikan manfaat yang besar dalam dunia pendidikan, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa mudahnya peserta didik mengakses informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penggunaan gawai yang tidak terkontrol dapat memengaruhi perilaku, etika, dan kebiasaan belajar peserta didik apabila tidak disertai pengawasan dari guru dan orang tua (Nata, 2021).

5. Kurangnya Sinergi antara Sekolah, Orang Tua, dan Masyarakat

Pembentukan karakter religius peserta didik tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kurangnya kerja sama antara sekolah dengan orang tua dalam membiasakan ibadah, akhlak, disiplin, dan nilai-nilai keislaman di lingkungan keluarga. Kondisi ini menyebabkan pembinaan karakter peserta didik kurang optimal.

Pendidikan Islam di Sekolah Dasar (SD) memiliki peran penting dalam membentuk keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik sejak usia dini. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai problematika yang memengaruhi efektivitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Permasalahan tersebut tidak hanya berasal dari aspek internal sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor keluarga, masyarakat, perkembangan teknologi, serta kebijakan pendidikan yang terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, berbagai problematika tersebut perlu dipahami agar dapat ditemukan solusi yang tepat dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di Sekolah Dasar (Muhaimin, 2020).

Kompetensi Guru yang Belum Optimal

Guru merupakan faktor utama dalam keberhasilan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Namun, masih terdapat guru yang mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka. Sebagian guru masih menggunakan metode ceramah sebagai metode utama sehingga peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, kemampuan guru dalam menyusun modul ajar, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, memanfaatkan teknologi digital, dan melakukan asesmen autentik masih perlu ditingkatkan (Sanjaya, 2021).

Contoh:

Pada materi tata cara salat, guru hanya menjelaskan rukun dan bacaan salat melalui ceramah tanpa memberikan demonstrasi atau praktik secara langsung. Akibatnya, peserta didik memahami teori, tetapi masih banyak yang belum mampu mempraktikkan gerakan salat dengan benar.

Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Di beberapa Sekolah Dasar, terutama di daerah terpencil, masih ditemukan keterbatasan ruang ibadah, perpustakaan, media pembelajaran, kitab atau buku keagamaan, perangkat teknologi, dan akses internet. Kondisi tersebut menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran yang menarik dan interaktif (Majid & Andayani, 2019).

Contoh:

Sekolah belum memiliki proyektor atau jaringan internet sehingga guru tidak dapat menampilkan video pembelajaran tentang kisah para nabi. Akibatnya, pembelajaran hanya mengandalkan buku teks dan penjelasan lisan yang kurang menarik bagi peserta didik.

Terbatasnya Alokasi Waktu Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar relatif terbatas dibandingkan dengan banyaknya materi yang harus dipelajari. Guru sering kali lebih fokus menyelesaikan target materi daripada memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan ibadah dan membiasakan perilaku Islami. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran lebih berorientasi pada aspek kognitif dibandingkan pembentukan karakter (Nata, 2021).

Contoh:

Guru hanya memiliki dua hingga tiga jam pelajaran dalam satu minggu untuk mengajarkan akidah, ibadah, akhlak, Al-Qur'an, dan sejarah Islam. Karena keterbatasan waktu, praktik wudu dan salat tidak dapat dilakukan secara rutin sehingga peserta didik kurang terampil dalam melaksanakan ibadah.

Pengaruh Perkembangan Teknologi dan Media Digital

Kemajuan teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi dunia pendidikan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Peserta didik kini mudah mengakses berbagai informasi melalui internet dan media sosial. Apabila penggunaan teknologi tidak diawasi, peserta didik dapat terpapar konten yang mengandung kekerasan, ujaran kebencian, pornografi, maupun perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Arifin, 2019).

Contoh:

Peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu bermain gim daring atau menonton video di media sosial daripada membaca Al-Qur'an atau mengerjakan tugas sekolah. Akibatnya, minat belajar menurun dan kebiasaan beribadah menjadi berkurang.

Kurangnya Sinergi antara Sekolah, Orang Tua, dan Masyarakat

Keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada guru, tetapi juga memerlukan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Dalam praktiknya, masih banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya pendidikan agama kepada sekolah tanpa memberikan pembiasaan di rumah. Akibatnya, nilai-nilai yang diajarkan di sekolah tidak selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Muhaimin, 2020).

Contoh:

Di sekolah peserta didik dibiasakan melaksanakan salat Duha dan membaca doa sebelum belajar. Namun, ketika berada di rumah, orang tua tidak membiasakan anak melaksanakan salat lima waktu atau membaca Al-Qur'an sehingga kebiasaan baik yang diperoleh di sekolah tidak berlanjut.

Heterogenitas Latar Belakang Peserta Didik

Peserta didik memiliki latar belakang keluarga, ekonomi, budaya, dan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut memengaruhi tingkat pemahaman, motivasi, serta kemampuan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Guru dituntut mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar kebutuhan belajar setiap peserta didik dapat terpenuhi (Kemendikbudristek, 2022).

Contoh:

Dalam satu kelas terdapat peserta didik yang sudah lancar membaca Al-Qur'an, tetapi ada pula yang masih belum mengenal huruf hijaiyah. Guru harus memberikan pendampingan yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik.

Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih fleksibel. Namun, perubahan kurikulum juga menuntut guru untuk menguasai penyusunan modul ajar, pembelajaran berbasis proyek, asesmen diagnostik, dan pembelajaran berdiferensiasi. Tidak semua guru memiliki kesiapan yang sama dalam melaksanakan perubahan tersebut sehingga implementasinya belum optimal (Kemendikbudristek, 2022).

Contoh:

Guru masih menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) lama dan belum mampu menyusun modul ajar sesuai Kurikulum Merdeka. Akibatnya, pembelajaran belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian, problematika pendidikan Islam di Sekolah Dasar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu kualitas sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas pendidikan, perkembangan teknologi, karakteristik peserta didik, serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pemanfaatan teknologi secara positif, penguatan budaya religius di sekolah, serta kerja sama yang erat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dengan langkah tersebut, pendidikan Islam di Sekolah Dasar diharapkan mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga memiliki keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.

Upaya Mengatasi Problematika Pendidikan Islam di Sekolah Dasar

Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Sekolah Dasar.

Pertama, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, lokakarya, komunitas belajar, dan pengembangan profesional berkelanjutan agar mampu menerapkan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan Kurikulum Merdeka.

Kedua, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran, seperti media digital, perpustakaan, laboratorium keagamaan, serta akses internet yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif.

Ketiga, memperkuat kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat melalui komunikasi yang intensif, program parenting, kegiatan keagamaan bersama, serta pembiasaan ibadah di rumah sehingga pendidikan karakter berlangsung secara berkesinambungan.

Keempat, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital sebagai media pembelajaran Pendidikan Agama Islam, misalnya melalui video edukasi Islami, aplikasi pembelajaran Al-Qur'an, media interaktif, dan platform pembelajaran digital dengan tetap memperhatikan etika penggunaan teknologi.

Kelima, mengembangkan budaya sekolah religius melalui pembiasaan salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, infak, kegiatan sosial, serta keteladanan guru sehingga nilai-nilai Islam menjadi budaya yang hidup dalam lingkungan sekolah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar melalui berbagai regulasi dan implementasi Kurikulum Merdeka. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih fleksibel, kreatif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan orang tua, serta budaya sekolah yang kondusif.

Problematika yang ditemukan menunjukkan bahwa tantangan pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek kurikulum, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia, perkembangan teknologi, serta perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian berbagai permasalahan tersebut memerlukan kerja sama antara pemerintah, sekolah, guru, keluarga, dan masyarakat agar pendidikan Islam di Sekolah Dasar mampu menghasilkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam.

Berbagai problematika yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kompetensi guru, kesiapan sekolah, dukungan keluarga, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara optimal, yaitu membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman (Muhaimin, 2020).

Meningkatkan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam

Guru merupakan pelaksana utama dalam proses pembelajaran sehingga peningkatan kompetensinya menjadi langkah yang sangat penting. Guru Pendidikan Agama Islam perlu mengikuti pelatihan, workshop, seminar, komunitas belajar, serta program pengembangan

profesional berkelanjutan agar mampu memahami Kurikulum Merdeka, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, memanfaatkan teknologi digital, dan melakukan asesmen autentik. Selain kompetensi pedagogik dan profesional, guru juga harus meningkatkan kompetensi kepribadian dan sosial agar dapat menjadi teladan bagi peserta didik (Sanjaya, 2021).

Contoh:

Guru mengikuti pelatihan implementasi Kurikulum Merdeka, kemudian menerapkan pembelajaran berbasis proyek dengan mengajak peserta didik membuat poster tentang pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari ajaran Islam.

Mengembangkan Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan Kontekstual

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam perlu dirancang agar berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Guru dapat menggunakan berbagai model pembelajaran seperti **Project Based Learning**, **Problem Based Learning**, diskusi, demonstrasi, simulasi, permainan edukatif, dan praktik langsung sehingga peserta didik lebih aktif dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam (Majid & Andayani, 2019).

Contoh:

Pada materi zakat dan sedekah, peserta didik tidak hanya mempelajari konsepnya, tetapi juga melaksanakan kegiatan penggalangan infak untuk membantu teman atau masyarakat yang membutuhkan.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sekolah perlu menyediakan ruang ibadah yang representatif, perpustakaan, media pembelajaran, perangkat teknologi, akses internet, serta bahan ajar yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Dukungan pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam pemenuhan fasilitas tersebut (Arsyad, 2020).

Contoh:

Sekolah menyediakan proyektor dan koleksi video edukasi Islami sehingga guru dapat menampilkan kisah para nabi atau tata cara ibadah secara lebih menarik dan mudah dipahami peserta didik.

Memanfaatkan Teknologi Digital secara Positif

Perkembangan teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Guru dapat menggunakan aplikasi pembelajaran Al-Qur'an, video edukatif, kuis interaktif, dan platform pembelajaran digital. Namun, peserta didik juga perlu dibimbing agar mampu menggunakan teknologi secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan etika Islam (Nata, 2021).

Contoh:

Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menonton video tentang kisah Nabi Muhammad saw. melalui platform pembelajaran sekolah, kemudian mendiskusikan nilai-nilai keteladanan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Memperkuat Pembiasaan Nilai-Nilai Keislaman

Pendidikan Islam akan lebih efektif apabila didukung oleh budaya sekolah yang religius. Pembiasaan seperti membaca doa sebelum dan sesudah belajar, salat Duha, salat Zuhur berjamaah, membaca Al-Qur'an, infak Jumat, menjaga kebersihan, serta menerapkan sikap jujur dan disiplin perlu dilakukan secara konsisten sehingga menjadi karakter peserta didik (Muhaimin, 2020).

Contoh:

Setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, seluruh peserta didik membaca doa, tadarus Al-Qur'an selama 10–15 menit, kemudian melanjutkan kegiatan belajar mengajar.

Meningkatkan Kerja Sama antara Sekolah, Orang Tua, dan Masyarakat

Keberhasilan pendidikan Islam memerlukan dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Sekolah perlu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua melalui program parenting, pertemuan rutin, laporan perkembangan peserta didik, dan kegiatan keagamaan bersama. Masyarakat juga dapat dilibatkan dalam kegiatan sosial, peringatan hari besar Islam, dan pembinaan karakter peserta didik (Majid & Andayani, 2019).

Contoh:

Sekolah mengadakan program "Gerakan Salat Berjamaah Bersama Keluarga" di rumah. Orang tua mencatat pelaksanaan salat anak selama satu minggu dan melaporkannya kepada guru sebagai bentuk kerja sama dalam pembinaan karakter religius.

Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islam

Penguatan karakter harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam seluruh kegiatan pembelajaran maupun aktivitas sekolah. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, toleransi, peduli lingkungan, dan menghormati sesama perlu ditanamkan melalui keteladanan guru, pembiasaan, serta berbagai kegiatan sosial dan keagamaan (Kemendikbudristek, 2022).

Contoh:

Guru membiasakan peserta didik mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya sebagai bentuk penerapan nilai kejujuran dan amanah dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil kajian, upaya mengatasi problematika pendidikan Islam di Sekolah Dasar harus dilakukan secara terpadu melalui peningkatan kualitas guru, inovasi pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi digital, pembentukan budaya sekolah religius, serta penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Langkah-langkah tersebut akan meningkatkan efektivitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam sekaligus memperkuat pembentukan karakter peserta didik.

Dengan implementasi berbagai upaya tersebut secara berkelanjutan, Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, berakhlak mulia, cakap memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu menghadapi tantangan kehidupan di era global tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam.

Kesimpulan

Kesimpulan

Pendidikan Islam di Sekolah Dasar (SD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penyelenggaraannya didasarkan pada berbagai kebijakan pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Standar Nasional Pendidikan, serta implementasi Kurikulum Merdeka yang memberikan fleksibilitas kepada guru dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berorientasi pada penguatan karakter.

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di Sekolah Dasar diwujudkan melalui pembelajaran intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, serta pembiasaan budaya sekolah yang religius. Kegiatan seperti pembelajaran Pendidikan Agama Islam, salat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, infak, peringatan hari besar Islam, dan proyek penguatan karakter menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan peserta didik. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan orang tua dan masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan pendidikan Islam di Sekolah Dasar masih menghadapi berbagai problematika, antara lain kompetensi guru yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, terbatasnya alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, pengaruh perkembangan teknologi digital, serta belum optimalnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pembinaan karakter peserta didik. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga pada kualitas implementasi di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi problematika tersebut, seperti peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan pembelajaran yang aktif dan kontekstual, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pemanfaatan teknologi digital secara positif, penguatan budaya sekolah religius, serta peningkatan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya sinergi tersebut, pendidikan Islam di Sekolah Dasar diharapkan mampu menghasilkan generasi yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, bertanggung jawab, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam. Keberhasilan pendidikan Islam pada jenjang Sekolah Dasar juga menjadi fondasi penting bagi pembentukan karakter peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya serta berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z. (2019). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Arsyad, A. (2020). *Media Pembelajaran*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,*

Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Jakarta: Kemendikbudristek.

Majid, A., & Andayani, D. (2019). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.).

Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Muhaimin. (2020). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Nata, A. (2021). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sanjaya, W. (2021). *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Fauziah, N., & Hidayat, R. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Agama Islam, 20*(2), 145–160.

Ismail, I., & Syarifuddin, S. (2022). Pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis karakter pada era Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Islam, 11*(2), 187–201.

Rahman, A., & Abdullah, M. (2023). Kebijakan pendidikan Islam dalam penguatan karakter peserta didik di sekolah dasar. *Jurnal Tarbiyah dan Pendidikan Islam, 8*(1), 35–49.

Sulaiman, S., & Fitriani, D. (2024). Problematika implementasi Pendidikan Agama Islam pada Kurikulum

Merdeka di sekolah dasar. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam, 9*(1), 55–68.

Yusuf, M., & Hasanah, U. (2024). Inovasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam menghadapi tantangan era digital di sekolah dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 8*(2), 112–126.